

KONFLIK, KEKERASAN, DAN MEDIASI SOSIAL DI PEDESAAN LAMPUNG 1988-2001

Oleh **Iim Imadudin**

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung
Jln. Cinambo No. 136 Ujungberung Bandung
Email: *iim.imadudin@yahoo.com*

Abstrak

Konflik dan integrasi merupakan dua unsur yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi itu terjadi dialektika yang mengakibatkan kehidupan menjadi dinamis. Konflik menjadi jalan ke arah terbentuknya integrasi baru. Dalam masyarakat yang terintegrasi sedemikian rupa, konflik dapat tumbuh dan berkembang.

Lampung sebagai wilayah yang multi-etnik memiliki potensi konflik yang tinggi. Fakta sejarah menunjukkan sejumlah konflik terjadi di daerah tersebut. Tahun 2000, misalnya, konflik sosial berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Ditinjau dari perspektif sejarah, konflik dan integrasi merupakan dua komponen yang berjalannya kelindan dalam sejarah masyarakat. Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap sebab-sebab dan mediasi konflik.

Kata Kunci: Konflik, integrasi, multi-etnik

Abstract

Conflict and integration represent two elements which are inherent in life of society. Between both taking place dialectically resulting life becomes dynamic. Conflict can become a road to form new integration. On the contrary, in an integrated society in such a manner conflict can grow and expand.

Lampung as a region where multi-ethnic societies have high conflict potential. History shows a number of conflicts have occurred. Evaluated from a historical perspective, integration and conflict represent two components interweaving in society's history. This research focuses its attention on conflict mediation and causes.

Keywords: *conflict, integration, multi-ethnic.*

A. Pendahuluan

Masalah integrasi menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa bernegara akhir-akhir ini. Kebijakan otonomi daerah yang telah digulirkan bagaikan pisau bermata ganda. Di satu sisi muncul kehendak yang kuat dari

penyelenggara negara agar pemerintahan berjalan dengan demokratis dan seimbang. Di sisi lain, daerah-daerah memperkuat identitas lokal yang sedikit banyaknya melonggarkan ikatan ideologi nasional. Padahal sejatinya otonomi daerah adalah momentum untuk koreksi

atas pendekatan penegasian kebudayaan, serta sebagai suatu gerakan budaya untuk menegakkan kembali harkat dan martabat komunitas.¹

Secara kultural, problem yang dihadapi lebih rumit lagi. Bangsa yang dibangun di atas kemajemukan etnik, bahasa, dan agama rentan terhadap disintegrasi dalam segala bentuknya. Tidaklah mengherankan apabila Robert Cribb berkata, “Memandang peta rasanya cukup memberi kesan tidak mungkin adanya negara Indonesia”.²

Wilayah Lampung tidak luput pula dari ancaman konflik sosial. Daerah ini sudah lama dikenal sebagai salah satu wilayah multi-etnik yang utama di Nusantara. Masuknya para pendatang dengan keragaman etnik tersebut dimulai dengan kebijakan *kolonisatie* (1905) pada masa Hindia Belanda, yang kemudian bertambah ekstensif pada masa Orde Baru melalui program transmigrasi. Interaksi yang semakin intensif tercipta ketika berlangsung pembukaan lapangan kerja baru, terutama di bidang perkebunan dan pertanian. Ada kelompok migran yang diorganisir, ada yang berkelompok, bahkan adapula yang bersifat individual. Ada yang menetap secara permanen, dan adapula yang bersifat *comutter* (bolak-balik). Julukan “Indonesia mini” agaknya melekat pada wilayah ini disebabkan kehidupan multi-etnik merupakan realitas historis, sekaligus sosiologis dan budaya.³

¹ H.S. Dillon, *Revitalisasi Budaya dan Otonomi*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

² Susanto Zuhdi, *Sejarah dan Kebudayaan sebagai Perikat Bangsa*. Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah, Bandar Lampung, 22 Juni 2006.

³ Iwan Nurdaya-Djafar dan Pulung Swandaru, *Pluralitas Kependudukan dalam Perspektif Budaya*. Makalah disampaikan dalam

Salah satu prasyarat berjalannya roda pembangunan adalah stabilitas nasional. Apabila kekacauan sosial tidak dapat dicegah dan ditangani dengan baik akan menimbulkan persoalan yang berujung terganggunya *sense of security* (rasa aman) di kalangan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu, usaha-usaha pembangunan masyarakat akan terhambat. Akhirnya konflik etnisitas apabila tidak mampu dikelola akan berujung pada disintegrasi bangsa.

Kajian tentang konflik dan integrasi dalam perspektif sejarah menjadi penting untuk dilakukan bukan saja karena keperluan akademis menambah bahan bacaan, akan tetapi kebutuhan fungsional untuk memahami persoalan-persoalan kekinian. Hal ini diperkuat dengan berkembangnya paradigma baru relasi antar-etnik, yaitu multikulturalisme.⁴ Wacana integrasi dan multikultur yang sekarang tengah mencuat, melalui kajian ini, dapat ditemukan faktanya dalam dinamika kehidupan multi-etnik di Lampung.

B. Hasil dan Bahasan

1. Kasus-kasus

Sejumlah kasus yang terjadi berikut ini dianggap merepresentasikan model konflik antar-etnik dan konflik sumber daya alam yang terjadi di pedesaan Lampung. Masih banyak lagi konflik yang terjadi yang sebenarnya penting pula untuk diungkapkan. Akan tetapi, karena keterbatasan penyajian

Kongres Kebudayaan V. Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

⁴ Multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan pengakuan terhadap keragaman (pluralitas) dalam kesederajatan untuk menegakkan demokrasi, keadilan, HAM, dan kesejahteraan masyarakatnya. Lebih lanjut lihat Usman Pelly, *Multikultural dan Rekonsiliasi; Menghindari Konflik Generasi Ketiga*. Makalah dipersiapkan untuk Kongres Kebudayaan IV. Bukittinggi, 21-23 Oktober 2003.

hanya beberapa saja yang ditampilkan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang dan penyelesaian konflik.

a. Konflik Bungkok, Kec. Jabung, Lampung Timur (1988)

Konflik Bungkok terjadi di wilayah Desa Bungkok, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 1988. Konflik tersebut melibatkan etnik Lampung dan etnik Jawa. Jauh sebelum terjadinya konflik fisik telah berkembang stereotip yang menandakan adanya ketegangan diam-diam antara kedua etnik tersebut. Etnik Lampung digambarkan orang dari etnik Jawa sebagai pemalas, harga diri tinggi, angkuh, dan pemboros. Sementara itu, etnik pendatang (Jawa) oleh etnik Lampung disebut sebagai orang pendatang yang tidak tahu diri dan tidak mau menyesuaikan diri, rakus, penjajah dan perusak adat budaya Lampung.⁵

Konflik Bungkok berawal dari adanya pertentangan antara individu yang semakin berkembang menjadi konflik antarkelompok etnik. Keadaan menjadi semakin menegangkan. Puncak dari konflik adalah terjadinya pembunuhan terhadap seseorang oleh sekelompok orang, baik dari etnik Lampung maupun etnik Jawa.

Penyelesaian dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur, seperti aparat keamanan (TNI dan Polri), Aparat Kecamatan dan Kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda. Akhirnya tercapai kesepakatan bersama dengan menandatangani surat perjanjian damai.

⁵ Hartoyo, *Sosial Model Pengelolaan Keserasian antara etnik Lampung dengan etnik pendatang pasca Konflik Bungkok, Jabung, Lampung Timur*, dalam <http://pustakailmiah.unila.ac.id>, diakses 15 September 2009.

Pemulihan sosial pasca konflik dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

1. Model kultural dengan pendekatan olah raga, pendidikan dan kesenian.
2. Model tradisional melalui ikatan antarpara tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Model teritorial melalui penjagaan wilayah utama potensi konflik yang terletak di sepanjang jalan penghubung antara Desa Bungkok dan Desa Sumber Rejo.

b. Konflik Warga Karang dan PT PLP (1996)⁶

Pembakaran fasilitas PT PLP terjadi karena perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan warga. Konflik terjadi sejak tahun 1996. Warga dusun melakukan protes, karena perusahaan berlaku curang. Perusahaan membeli tanah seluas 500 ha, namun yang diakui hanya 335 ha. Ketua BPK setempat (semacam badan perwakilan desa) berangkat ke Bandar Lampung menemui pimpinan perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan tidak berniat meluruskan persoalan. Mereka mengingkari janji-janji yang telah diungkapkan kepada perwakilan masyarakat. Pada pertemuan pertama, perusahaan berjanji akan membangun masjid dan balai pertemuan warga. Namun, pada pertemuan kedua, janji tersebut dibatalkan. Perusahaan tidak menunjukkan keseriusannya menyikapi kasus tersebut.

Masyarakat benar-benar marah dan berdemonstrasi ke kantor perusahaan di Giriharjo. Kemudian berlangsung negosiasi. Masyarakat membentuk tim untuk bernegosiasi dengan perusahaan. Ada 11

⁶ Patrick Baron and David Madden, *Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia*. Washington, D.C.: The World Bank, 2004.

perwakilan masyarakat dalam tim negosiator. Berlangsung 2 kali perundingan di Bandar Lampung dan 7 kali di kantor perusahaan, tetapi tidak menghasilkan solusi. Perundingan berlarut-larut hingga lebih dari 2 tahun.

Setelah perundingan terakhir, massa benar-benar marah dan insiden pun terjadi. Tim negosiator dari warga tidak pernah bertemu pemilik perusahaan. Akhirnya, masyarakat menduduki kantor perusahaan hingga tidak dapat beroperasi. Pada awalnya demonstrasi berlangsung tertib. Lama kelamaan semakin tidak terkendali. Petugas keamanan mencoba menenangkan massa, namun malah mendapatkan perlawanan. Pembakaran fasilitas perusahaan mengakibatkan 3 gedung dan 10 rumah rusak, dan kerusakan fasilitas lainnya, seperti traktor. Perusahaan mengalami kerugian finansial, karena setelah kejadian ini mereka sulit memperoleh pinjaman dari bank.

Agaknya penyelesaian terhadap konflik ini harus melibatkan pemerintah sebagai mediator yang netral. Pemerintah secara proaktif menempatkan diri mereka secara seimbang antara melindungi rakyat dan memelihara iklim wirausaha yang kondusif.

c. Kasus Tanah Sebelas Desa di Kabupaten Lampung Tengah (1998)⁷

Pada tahun 1970, atas permintaan perusahaan, tanah masyarakat seluas 10.000 ha diserahkan kepada pemerintah untuk ditanami dengan sistem kontrak (hak pakai) berjangka waktu 25 tahun. Masyarakat memperoleh ganti rugi sebesar Rp.500-Rp.1000 per tanam tumbuh. Sebagian ganti rugi tersebut tidak sampai ke masyarakat disebabkan

terjadinya penggelapan yang diduga dilakukan oleh beberapa kepala desa, antara lain Kepala Desa Padang Ratu, Kuripan, Negara Bumi Udik, Aji Tua, Bumi Aji, dan Suka Jaya. Kemudian, pada tahun 1972 tanah tersebut beralih tangan pada PT Intrada dengan sistem kontrak dalam waktu 25 tahun. Dua tahun kemudian (1972) pemerintah membatalkan kontrak PT Intrada, dan penguasaan lahan diberikan kepada PT Pago.

Tahun 1983-1988 perusahaan yang diberikan hak pakai tidak melakukan pengolahan lahan sehingga dimanfaatkan masyarakat. Pada tahun 1984, Departemen Transmigrasi menetapkan lahan tersebut sebagai lahan persiapan para transmigran yang menjadi korban bencana letusan Gunung Merapi, Jawa Tengah. Kenyataannya, berlangsung perubahan status hak pakai, lahan tersebut disewakan pemerintah kepada PT TDA pada tahun 1987. Masyarakat yang menempati lahan tersebut mengalami pengusiran secara paksa. Perusahaan mulai mengusahakan pe-ngelolaan lahan itu. Pada saat yang sama, sejumlah 73 warga masyarakat memohon izin pengolahan sebagian dari lahan seluas 10.000 ha tersebut. Permintaan sekelompok warga itu dikabulkan. Pemberian izin ini berdampak pada kekecewaan warga dari 11 desa di sekitar PT TDA.

Mereka mengekspresikannya dengan berunjuk rasa ke DPRD setempat untuk menuntut keadilan. Meski perundingan belum mencapai kata mufakat, masyarakat melakukan pematokan terhadap lahan yang menjadi sengketa. Bupati Lampung Tengah dengan sepengetahuan DPRD setempat mengambil kebijakan bahwa masyarakat diperkenankan mengelola lahan tersebut.

Persoalan yang menyangkut penguasaan dan pengelolaan lahan tersebut kembali memanas beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1998 areal perkebunan PT TDA mengalami

⁷ Bahan tulisan ini diperoleh dari Aryanto, "Kasus Tanah Sebelas Desa di Kabupaten Lampung Tengah Versus PT Pago/PT TDA Lampung", dalam Nursyamsiah dkk, *Mediasi dan Negoisasi*, tth.

pembakaran. Perjuangan masyarakat merebut lahan yang telah mereka tempati semakin menguat. Pada tanggal 27 Juli 1998 dengan melibatkan para aktivis, mereka berjuang agar kasus yang dihadapi diketahui media massa dan Menteri Transmigrasi.

Pada tahun 2000, masyarakat melakukan demonstrasi secara besar-besaran. Ketua DPRD Lampung dan Bupati Lampung Tengah disandera massa. Masyarakat menuntut agar semua aktivitas PT TDA dibekukan. Bersamaan dengan tuntutan tersebut, tindak anarkisme makin meluas. Karena tuntutan belum juga terealisasi, fasilitas PT TDA dirusak dan dijarah oleh oknum masyarakat. Masyarakat menanam nanas di seluruh bagian lahan PT TDA. Tindakan warga bertanam nanas dilegitimasi Bupati sebagai kompromi pemerintah terhadap masyarakat.

Usaha untuk mencari titik temu dari sejumlah permasalahan yang dihadapi terus bergulir. Pada bulan Juni 2000, berlangsung musyawarah yang melibatkan perwakilan masyarakat sebelas desa, aktivis pendamping masyarakat, PT TDA, dan Pemda Lampung Tengah.

Hasil kesepakatan perundingan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat dari 11 desa bersetuju untuk menerima lahan berapapun luasnya. Sebanyak 2667 KK (di luar pemohon lain) menyatakan tidak akan melakukan gugatan terhadap pembagian lahan itu.
2. Masyarakat memberikan jaminan tidak akan ada gangguan terhadap seluruh aktivitas PT TDA.
3. Negoisasi ulang antara pihak perusahaan dan masyarakat akan dilakukan pada saat kontrak kerja PT TDA dengan pihak Departemen Transmigrasi selesai.

d. Konflik Blambangan Umpu dengan Umpu Bakti (1999)⁸

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999. Beberapa penduduk melaporkan bahwa orang yang berasal dari etnik Lampung mengubah perbatasan desa dengan menggunakan traktor. Para pemuda Umpu Bakti mencoba berdialog dengan pemuda Blambangan Umpu untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Akan tetapi, agaknya sia-sia saja. Warga Umpu Bakti kehilangan kesabaran dan mulai melakukan penganiayaan. Kemarahan warga Umpu Bakti diperkuat oleh ucapan kepala kampungnya, “Ini tanahmu, perjuangkan sampai titik darah penghabisan !”

Orang Blambangan Umpu merasa kaget ketika sekelompok penduduk Umpu Bakti melakukan penyerangan. Hanya ada dua ratus orang yang menjaga kampung. Untunglah sebelum kontak fisik terjadi, polisi segera datang. Tokoh masyarakat dan polisi mencoba menenangkan massa dan menegosiasikan akar permasalahannya. Masyarakat Umpu Bakti menginginkan agar penyelesaian konflik perbatasan ini melibatkan pihak pemerintah. Sebaliknya, warga Blambangan Umpu bersikeras tidak mau diintervensi pemerintah. Warga Umpu Bakti tetap melakukan gangguan sepanjang masyarakat Blambangan Umpu mengelola wilayah yang menjadi sengketa. Penyelesaian konflik semacam ini hendaknya diselesaikan lewat pendekatan kultural yang melibatkan tokoh-tokoh adat. Kepemimpinan kharismatis elit lokal berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mengambil tindakan sosialnya.

⁸ Yuhki Tajima, *Mobilizing for Violence: The Escalation and Limitation of Identity Conflicts*. Washington, D.C.: The World Bank, 2004.

e. Kekerasan Massa di Jabung, Gunung Makar, dan Mumbang Jaya (1999)⁹

Pada suatu hari di bulan Desember 1999, bertepatan dengan hari lebaran, penduduk memenuhi jalan kampung transmigran Mumbang Jaya, Gunung Makar, dan Jabung (Kampung Jawa). Pada pukul satu siang, tiga orang warga Jabung mengendarai motor dengan kecepatan tinggi melalui Jalan Gunung Makar yang ramai. Beberapa pemuda Gunung Makar menunjukkan reaksi keras dan berteriak “begal”. Segera setelah mendengar teriakan itu, warga Gunung Makar dan Mumbang Jaya mengejar ke jalan dan memburu tiga pemuda Jabung tersebut. Seorang pemuda Jabung menendang pemuda Gunung Makar yang mencoba memukulnya.

Setelah mereka memburu ke Mumbang Jaya, kepala Kampung Gunung Makar berhasil menangkap dua orang dari tiga pengendara motor tersebut dan membawanya ke Gunung Makar. Kepala kampung mencoba menenangkan massa. Para penduduk sudah berkumpul dan menuntut agar dua orang tersangka diadili. Kepala kampung tidak begitu yakin bahwa pemuda itu seorang begal karena keluarganya termasuk warga yang berkecukupan. Pengadilan akan segera digelar apabila korban berhasil ditemukan. Sejam kemudian mereka kembali, tetapi tidak menemukan korban. Kedua tertuduh segera dibawa oleh massa warga Jabung yang jumlahnya dua ratus orang. Masalah baru muncul, ketika penduduk hendak kembali ke rumahnya masing-masing, ada motor yang hilang. Itulah sebabnya mengapa mereka berteriak “begal”.

Sebanyak 200 penduduk Jabung dan 100 orang dari 4 desa transmigran terlibat dalam bentrokan. Seorang warga dari Jabung tidak sempat melarikan diri dalam bentrok tersebut. Ia tertangkap dan sebagian yang lain mengalami luka-luka. Pemuda Jabung sudah bersiap-siap hendak menyerang Mumbang Jaya. Ketika itu petugas keamanan yang sedang menuju peternakan sapi dihentikan massa. Orang-orang menanyakan ia hendak kemana. Dijawabnya, “Mumbang Jaya”. Massa merusak mobil dan melukai wajahnya. Untunglah, beberapa orang berhasil mengamankannya sehingga tidak terjadi kekerasan lebih lanjut. Tidak lama kemudian tentara tiba dan langsung membubarkan massa. Sebagian besar massa pulang, hanya ada 20-30 orang yang berupaya melakukan kekerasan fisik. Dua orang tentara mengawalinya ke kantor polisi terdekat. Sementara itu, ada tiga warga Mumbang Jaya ditangkap dekat Desa Jabung.

Beberapa hari kemudian, sepuluh warga Gunung Makar mendatangi Desa Jabung untuk menunjukkan simpatinya pada korban dan menyampaikan permohonan maaf. Intensitas konflik sepertinya mulai menurun. Namun, sebanyak 200-300 pemuda Jabung berencana melakukan aksi balas dendam. Emosi massa berhasil diredam penimbang Jabung. Seminggu kemudian berlangsung musyawarah. Polisi, tentara, kepala kampung, pimpinan adat, pemuda, dan camat berkumpul bersama untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

⁹ Yuhki Tajima, *Mobilizing for Violence: The Escalation and Limitation of Identity Conflicts*. Washington, D.C.: The World Bank, 2004.

f. Konflik Warga Negeri Besar dengan Negara Jaya (2000)¹⁰

Pada suatu malam di bulan Desember 2000 di Desa Negara Jaya, seorang pencuri tertangkap oleh masyarakat. Massa yang hadir cukup banyak jumlahnya, kira-kira 50-100 orang. Emosi massa tidak terkendali hingga akhirnya mengakibatkan pembunuhan terhadap pemuda pencuri itu. Memang, tindak pencurian semakin meningkat setelah terjadinya krisis moneter (1997-1998). Para pencuri itu diduga berasal dari desa tetangga, Negeri Besar. Beberapa orang dari Negeri Besar mendengar melalui siaran radio bahwa dua orang warganya tewas dalam amuk massa. Tubuhnya hangus terbakar. Diberitakan bahwa ia hanya mencuri gula, teh, dan kopi.

Sebanyak 300 orang bersenjatakan pisau, arit, dan bahan bakar melakukan konsolidasi. Warga amat marah setelah melihat jasad korban yang begitu memilukan. Penimbang dan polisi berupaya menenteramkan kemarahan warga. Sebagai upaya mencegah konflik yang lebih besar lagi, musyararah adat digelar. Warga yang kerabatnya menjadi korban meminta pelaku penganiayaan berat ditangkap. Warga Negara Jaya kemudian memberikan dua ekor sapi pada penduduk Negeri Besar sebagai tanda perdamaian dan penyesalan yang mendalam.

g. Konflik Way Tuba: Masyarakat versus Tentara (2001)¹¹

Pada tahun 1991, terbit keputusan Gubernur Lampung yang menginstruksikan

masyarakat Desa Way Tuba agar menyerahkan sebagian tanahnya untuk digunakan tentara. Kompensasi sebesar 100.000 rupiah diberikan untuk tiap hektar dan 1.500 rupiah untuk tiap tanaman yang dimiliki warga. Lahan yang sudah ditanami warga dibersihkan oleh tentara. Sesungguhnya masyarakat tidak menyetujui pengalihan lahan tersebut, tetapi mereka hanya diam. Tanah mereka harus diserahkan untuk kepentingan negara. Dalam perkembangan selanjutnya, lahan tersebut tidak digunakan tentara. Ternyata, suatu yayasan yang didirikan para jenderal menjual lahan itu secara komersial pada PT Karisma. Kemudian, perusahaan membuka perkebunan sawit di tempat yang sebelumnya menjadi milik warga. Masyarakat Way Tuba benar-benar kehilangan tanahnya.

Pada waktu yang bersamaan, muncul desas-desus bahwa lahan tersebut akan dibangun lapangan tentara. Luas keseluruhan lahan mencapai 385 ha, dan hanya 215 hektar yang dikuasai masyarakat. Warga harus menyerahkan tanahnya, dan tentara akan membayar kompensasi atas tanah. Tanpa seizin masyarakat, tentara mengukur lahan yang mereka butuhkan dan mengambilnya secara paksa. Masyarakat tidak dapat berbuat apa-apa, karena takut terhadap tentara. Setelah itu menjadi jelas bahwa kompensasi yang mereka keluhkan tidak dipenuhi gubernur dan tentara. Pertemuan beberapa kali diadakan, tetapi ganti rugi tidak juga diberikan.

Konflik makin mengeras pada bulan November 2001. Dalam suasana penuh ketidakpastian, masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD setempat. Para wakil rakyat menjadi mediator yang menghubungkan masyarakat dengan perusahaan. Permintaan warga sebesar 5 juta rupiah per hektar tidak disetujui perusahaan. DPRD mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pihak perusahaan memberi tiga pilihan kepada masyarakat, yaitu

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

membeli tanah kembali dari perusahaan, bekerja sama dengan perusahaan, atau berpartisipasi dalam program plasma.

2. Analisis

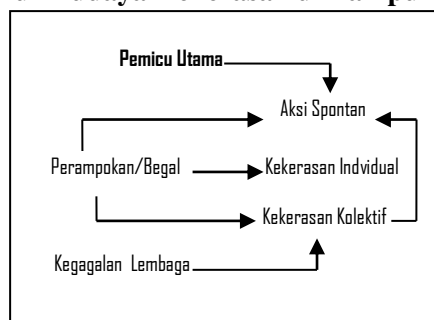
Interaksi sosial merupakan sesuatu yang niscaya dalam kehidupan manusia yang kemudian berkembang menjadi interrelasi sosial. Dalam interaksi sosial akan terjadi hubungan-hubungan sosial timbal balik (*social interrelationship*) yang dinamis antarperorangan, antar-kelompok, dan antara perorangan dengan kelompok. Secara faktual, interaksi sosial mewujud menjadi dua hal yang diametral: antara konsensus dan integrasi, serta konflik dan disintegrasi.

Integrasi sosial merupakan proses penyatupaduan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing. Menurut Ogburn dan Nimkof, integrasi sosial adalah "*the proses where by individuals or groups once dissimilar become identified their interest and outlook*". Proses integrasi sosial bukanlah proses yang berjalan dengan cepat, karena integrasi sosial menyangkut suatu proses mental yang hanya bisa berproses secara lambat dan bertahap.¹²

Pada dasarnya pencapaian suatu integrasi sosial melalui beberapa tahap. Tahap tahap tersebut dapat berlangsung secara evolusioner dari tahap yang rendah, yaitu tahap terisolasinya (terpisahnya) kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan, menuju tahap yang paling tinggi, yaitu tahap bercampurnya kelompok minoritas ke dalam kehidupan sosial dan kebudayaan

kelompok dominan. Namun kadangkala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi secara cepat. Proses menuju ke arah integrasi sosial pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap-tahap *segregasi* atau *separatisme*, *akomodasi*, *akulturasi*, *asimilasi*, dan *amalgamasi*.

Alur Budaya Kekerasan di Lampung



Sumber: Diadaptasi dari Patrick Baron and David Madden (2004)

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya dapat berupa keluhan saja, sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Konflik merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan dapat dipandang dari berbagai sudut. Robert Chambers menyebutkan beberapa faktor yang menyertai kemiskinan, seperti kebodohan, keterasingan, tidak memiliki sumber daya alam memicu keresahan-keresahan yang menyimpan konflik yang luar biasa.¹³

Corak interaksi antaretnik dapat berwujud kerjasama, persaingan, dan konflik. Ketiga bentuk interaksi ini dilandasi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya perebutan sumber daya yang terbatas dan berharga di antara golongan etnik yang ada;

¹² Tim IRE Daerah Sumbar, *Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Etnik Minang dan Etnik Nias di Kecamatan Padang Selatan*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: IRE, 2004.

¹³ Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan*. Yogyakarta: Insist, 2002

2. Peranan orang-orang tertentu yang ada dalam masyarakat; dan
3. Model-model pengetahuan budaya masing-masing etnik yang digunakan sebagai referensi memahami etnik lain.¹⁴

Konflik sosial dapat dipahami dalam dua dimensi. Pertama, konflik dianggap selalu ada dan mewarnai segenap interaksi manusia dan struktur sosial. Kedua, konflik adalah suatu pertikaian terbuka (*manifest conflict*), seperti perang, pemogokan, dan gerakan perlawanan.¹⁵

Sejumlah konflik yang pernah terjadi di pedesaan Lampung dapat dibedakan menjadi dua jenis, konflik sumber daya alam dan konflik SARA. Konflik sumber daya alam menyangkut hak penguasaan dan penggunaan lahan. Subjeknya adalah petani dengan pengusaha, petani dengan pemerintah, petani dengan petani, dan seterusnya. Berarti konflik terjadi secara horisontal dan vertikal. Sementara itu, terjadi pula konflik SARA, baik secara terbuka maupun berupa ketegangan diam-diam yang dipicu oleh stereotip dan faktor sosial lain.

Faktor dominan pemicu konflik adalah merajalelanya tindak kriminalitas. Kejahatan yang awalnya bersifat personal meluas menjadi komunal. Selama ini sering dikatakan bahwa konflik disebabkan melonggarnya kohesivitas sosial. Masuknya pendatang melalui kolonisasi dan transmigrasi memberi prakondisi bagi munculnya konflik sosial. Dalam lingkup komunal, konflik

biasanya diselesaikan melalui mediasi secara informal, yaitu musyawarah secara adat. Para pemuka dan tetua adat mengambil prakarsa untuk melakukan perdamaian. Diakui atau tidak, demokrasi elitis masih mendominasi proses mediasi konflik. Berbeda dengan konflik komunal, konflik vertikal hampir selalu melibatkan proses hukum positif.

Harus disadari bahwa memahami konflik sosial yang bersifat komunal lebih rumit dibandingkan konflik antarindividu. Pelaku tindak kejahatan akan dipandang sebagai orang yang memiliki sistem nilai yang negatif. Mereka terbiasa dengan pola pikir yang tidak memikirkan kepentingan orang lain. Apabila perspektif tersebut diterapkan pada konflik yang bersifat kolektif, seperti amuk massa, tentu akan menyulitkan. Para pelaku anarkis dalam amuk massa merupakan orang-orang yang sangat bersahaja dalam kesehariannya. Mereka bersikap santun, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan taat beribadah. Maka, menganalisis fenomena seperti ini harus melihat dari akar persoalannya yang boleh jadi bersifat kompleks.

Konflik sebenarnya merupakan bagian dari ekspresi berdemokrasi sepanjang berada dalam koridor hukum. Perilaku massa yang radikal muncul sebagai wujud dari rasa frustrasi. Hukum yang tidak memihak rakyat, kemiskinan, dan tidak adanya keteladanan memunculkan sikap emosional yang tidak tersalurkan. Pemerintah harus membangun kembali tatanan harmonisasi sosial budaya, politik, dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Para pemimpin harus menyadari bahwa perilakunya menjadi cermin masyarakat.

Dengan latar keanekaragaman sosial-budaya, Lampung menyimpan potensi konflik yang cukup tinggi. Ada kecenderungan untuk menonjolkan ego-sentrisme dan etnosentrisme. Sebagai

¹⁴ Parsudi Suparlan, *Interaksi antaretnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1989.

¹⁵ Abdul Djunaedi, *Dimensi Budaya dalam Situasi Konflik di Aceh*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

warga asli, etnis setempat merasa absah memperoleh perlakuan khusus dibandingkan orang yang datang kemudian. Ikatan warga pendatang terhadap tanah Lampung tidak begitu kuat, karena kebanyakan dari mereka melakukan mudik ke kampung halaman pada hari lebaran. Sementara, bagi para pendatang keberhasilan di perantauan merupakan wujud dari kerja keras dan kemampuan beradaptasi secara kreatif pada lingkungan yang baru. Perspektif yang terlalu melihat ke dalam pada gilirannya sering memicu berlangsungnya konflik mulai dari skala kecil sampai konflik yang meluas. Meski tidak dapat dimungkiri, banyak para perantau yang hidup menetap sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang silam telah mewariskan generasi baru. Generasi yang tidak terlalu memedulikan kesukubangsaan yang memang diterima secara askriptif, melainkan lebih peduli pada upaya memberikan sumbangsih pikiran dan tindakan untuk kesejahteraan dan kemajuan tanah Lampung.

C. Penutup

Lampung merupakan representasi dari wujud keindonesiaan yang pluralistik. Kemajemukan etnik, agama, sosial, dan budaya tumbuh dan berkembang dalam perjalanan sejarah yang panjang. Sejarah yang memanjang dalam dimensi waktu dan melebar dalam dimensi ruang sejak persentuhannya dengan Islam, kolonisasi, transmigrasi hingga mobilitas sosial yang berlangsung kian intensif melahirkan masyarakat dengan coraknya yang khas. Kedatangan pelbagai etnik dengan agama dan ragam kepentingan memberikan warna yang unik terhadap keragaman tersebut. Dengan kata lain, tumbuh masyarakat baru dengan corak yang berbeda dari fase sebelumnya. Masyarakat Lampung sudah memberikan sumbangsih dalam peradaban

yang mengapresiasi adanya keberagaman.

Merayakan keberagaman dan potensi konflik sebaiknya tidak dibaca secara oposisional. Memperhadapkan dua hal tersebut di samping tidak relevan juga menjadi kontraproduktif bagi integrasi sosial yang digencarkan pemerintah sekarang ini. Keduanya tumbuh dalam dinamika kemasyarakatan yang sering dipengaruhi bukan saja faktor internal; melainkan tarikan kepentingan lokal, nasional, dan global. Motto *sang bumi ruwa jurai* telah mengkompromikan kepentingan penduduk asal dan pendatang dalam sketsa kultural lokal yang dinamis.

Dari pelbagai konflik yang terjadi di Bandar Lampung dan sekitarnya dapat dipelajari model-model konflik dan bagaimana upaya untuk memediasi konflik. Selama ini pengamatan terhadap terjadinya konflik hanya dilihat dari pemicunya saja, dan bukannya prakondisi yang melatarbelakanginya. Sebagai salah satu *hotspot* konflik, Lampung menjadi barometer dalam penanganan konflik secara sosial pada wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. *Sang Bumi Ruwa Jurai* dengan caranya sendiri memberikan sumbangsih bagi keindonesiaan yang majemuk dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baron, Patrick and David Madden. 2004. *Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia*. Washington, D.C: The World Bank.
- Dillon, H.S. 2003. *Revitalisasi Budaya dan Otonomi*. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.

- Djafar, Iwan Nurdaya dan Pulung Swandaru. 2003.
Pluralitas Kependudukan dalam Perspektif Budaya. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.
- Djunaedi, Abdul. 2003.
Dimensi Budaya dalam Situasi Konflik di Aceh. Makalah disampaikan dalam Kongres Kebudayaan V. Bukittinggi, 19-23 Oktober 2003.
- Hartoyo. 2009.
Sosial Model Pengelolaan Keserasian antara etnik Lampung dengan etnik pendatang pasca Konflik Bungkok, Jabung, Lampung Timur, dalam <http://pustakailmiah.unila.ac.id>, diakses 15 September 2009.
- Pelly, Usman. 2003.
Multikultural dan Rekonsiliasi: Menghindari Konflik Generasi Ketiga. Makalah dipersiapkan untuk Kongres Kebudayaan IV. Bukittinggi, 21-23 Oktober 2003.
- Suparlan, Parsudi. 1989.
Interaksi antaretnik di Beberapa Propinsi di Indonesia. Jakarta: Depdikbud.
- Tajima, Yuhki. 2004.
Mobilizing for Violence: The Escalation and Limitation of Identity Conflicts. Washington, D.C.: The World Bank.
- Tim IRE Daerah Sumbar. 2004
Interaksi Sosial Budaya Masyarakat Etnik Minang dan Etnik Nias di Kecamatan Padang Selatan. Laporan Penelitian. Yogyakarta: IRE, 2004.
- Zubir, Zaiyardam. 2002.
Radikalisme Kaum Pinggiran: Studi tentang Ideologi, Isu, Strategi, dan Dampak Gerakan. Yogyakarta: Insist.
- Zuhdi, Susanto. 2006.
Sejarah dan Kebudayaan sebagai Perekat Bangsa. Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah, Bandarlampung, 22 Juni 2006.